

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

a. Imam asy-Syafi'i

Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam asy-Syafi'i ini mereka berpendapat bahwasannya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah jika tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak ijbar, baik wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda.

b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 meniadakan hak ijbar wali akan tetapi sebelum melangsungkan perkawinan harus ada persetujuan kedua calon mempelai hal ini terangkum dalam pasal 6 ayat 1. sementara itu kalau terjadi perkawinan paksa, para pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

c. Melihat dari perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penulis lebih setuju kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang meniadakan hak ijbar wali dalam perkawinan. Karena dilihat dari kondisi pada saat sekarang ini wanita lebih memilih atau mencari pendamping hidupnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Terkait dengan Hak ijbar dalam perkawinan hal ini sesuai dengan kondisi pada zaman dahulu dimana pada waktu itu segala urusan mengenai anak perempuan itu sepenuhnya orang tua yang menentukan untuk masa depan anaknya. karena pada waktu itu keadannya sosiologis yang sangat berpengaruh. Akan tetapi karena pada saat sekarang ini karena tingkat ilmu pendidikan yang semakin maju dan berkembang sehingga anak bisa memilih pasangan hidupnya.
2. Dilihat dari kondisi pada saat sekarang ini hendaklah orang tua tidak ada pemaksaan terhadap anaknya karena anak menginginkan bahwa suatu perkawinan itu dilakukan atas dasar saling suka sama suka dan saling sayang menyayangi.
3. Penelitian yang berkaitan dengan hak ijbar dalam perkawinan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Terutama untuk mencari sebuah relevansi hak ijbar di era globalisasi seperti sekarang. sehingga Perbedaan pandangan dan pola pikir dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam mengeluarkan produk hukum perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan tersebut dapat diterima dan dipahami dengan benar.